

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, perusahaan milik negara dan organisasi lainnya dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik.

Penetapan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah merupakan dasar penyelenggaraan otonomi daerah (Mardiasmo,2002:24). Kemudian dilakukan perubahan dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah (Abdul Halim,2012:1) dan perubahan seterusnya atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Lahirnya otonomi menjadikan pergeseran sistem pemerintahan yang semula berwujud sentralisasi menjadi desentralisasi. Hal ini mengakibatkan dua implikasi strategis, yaitu pertama situasi desentralisasi politik dan keuangan telah memberikan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat daerah untuk menentukan arah, kebijakan, tujuan, program, hingga aktivitas organisasi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan, kedua pemerintah daerah telah diberi

keleluasan yang lebih besar untuk mendapatkan, mengelola dan mengalokasi dana yang diperlukan dalam urusan pelayanan kepada masyarakat (Budi Mulyawan,2009:6).

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Tanjung,2009:4). Pemerintahan daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber daya khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan didaerahnya. Sumber-sumber pemerintahan daerah harus digali secara maksimal, namun tentu saja didalam koridor peraturan perundangan yang berlaku.

Keadaan pemerintahan saat ini sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh kurang adanya penerapan sistem pemerintahan yang baik, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, bukan saja sistemnya yang belum tertata tetapi krisis multidimensi yang dihadapi oleh negara saat ini. Pemerintah dituntut untuk memperlihatkan kinerja yang diluar batas biasa untuk memperbaiki keadaan, sehingga diperlukan tolok ukur penilaian kinerja pemerintah yang tidak biasapula.Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi (Indra,2006:274).

Penerapan *good governance* mulai menjadi tuntutan masyarakat Indonesia terutama sejak digulirkannya tuntutan reformasi disegala bidang pada tahun 1997. Pada tahun 1997-1998 terjadi gelombang reformasi antara lain menuntut

adanya reformasi disegala bidang termasuk di dalamnya pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta tuntutan otonomi daerah yang lebih terdesentralisasi (Mardiasmo,2002:32).

Tuntutan masyarakatakan *transparansi, akuntabilitas, responbility, dan fairnes* menurut aparatur pemerintah untuk lebih baik dalam mengelola sistem pemerintahan saat ini. Sehingga lahirnya *good governance* saat ini menjadi mutlak diperlukan mengingat *good governance* mensyaratkan suatu pengolahan yang baik. Dalam sebuah organisasi ada empat prinsip dari *good governance* yaitu *transparancy, akuntabilitability, responbility, dan fairnes* (Arie Soelendro ,2000:13).

Penerapan prinsip *good governance* dalam pemerintahan bertujuan agar penataan pemerintahan lebih baik. Pemerintah dituntut agar dapat mengelola daerahnya dengan baik, memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki demi kemakmuran masyarakat. Pemerintah juga harus dapat menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat dan sektor swasta. Karena pemerintahan yang baik dapat mengatur semua aspek yang ada disekitarnya dengan baik. Tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat (Dedy Somantri Yusuf,2009:2).

Selain *good governance* pengendalian intern juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja suatu organisasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Rina Tresnawati, 2012:142).

Selain itu system pengendalian intern sangat penting dalam menunjang perbaikan pengelolaan pemerintah daerah dan merupakan faktor pendukung untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan sebagai cerminan dari kinerja yang baik. Tidak hanya *good governance* dan pengendalian intern saja yang berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan, faktor individu dalam organisasi juga mempengaruhi kinerja pemerintahan, diantaranya komitmen Organisasi. Berkaitan erat dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam organisasi.

Komitmen organisasi dibangun atas dasar kepercayaan pekerja atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi. Oleh karena itu, komitmen organisasi akan menimbulkan rasa ikut memiliki (*A Sense of Belonging*) bagi pekerja terhadap organisasi. Hal ini diperjelas oleh Elvyra Zeyn (2011), dengan terciptanya pemerintahan yang bersih (*Good Governance*) akan meningkatkan kesadaran pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah didukung oleh kompetensi pegawai disertai dengan komitmen organisasi yang tinggi dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP maka akan menghasilkan laporan keuangan berkualitas dan dapat menilai kinerja aparatur pemerintahan.

Keberhasilan dan kinerja seseorang dalam suatu bidang pekerjaan ditentukan oleh tingkat kompetensi, profesionalisme, juga komitmen terhadap bidang yang ditekuninya. Terkait dengan faktor individual, komitmen organisasi merupakan suatu daya dari seseorang dalam mengidentifikasi keterlibatan dalam suatu organisasi.

Pemerintahan yang komitmen terhadap organisasi akan menunjukkan sikap dan gaya kepemimpinan yang baik terhadap lembaganya, pemerintah akan memiliki jiwa untuk tetap membela organisasinya, berusaha meningkatkan prestasinya, dan memiliki keyakinan yang pasti untuk membantu mewujudkan tujuan organisasi (Arifah, 2012).

Faktor pendukung untuk terciptanya manajemen kinerja yang baik diperlukan juga komitmen yang dimiliki oleh setiap individu. Komitmen tersebut dapat tercipta apabila individu dalam organisasi sadar akan hak dan kewajibannya dalam organisasi tanpa melihat jabatan dan kedudukan masing-masing individu, karena pencapaian tujuan organisasi merupakan hasil kerja semua anggota organisasi yang bersifat kolektif. Hal tersebut membuktikan bahwa akuntabilitas pun sangat diperlukan sebagai pertanggungjawaban kinerja setiap individu tersebut (Akriyanto, 2012)

Dedy Yusuf (2009) meneliti tentang Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Kota Bandung . Hasil penelitiannya menunjukkan secara simultan bahwa pelaksanaan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan. Namun berbeda dengan penelitian Ismail Pamilih (2014)

bahwa pemahaman tentang *good governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor.

Penelitian Negla Sari (2015) juga meneliti tentang Pengaruh Pemahaman Prinsip-Prinsip *Good Governance*, Pengendalian Intern, Budaya Organisasi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu penelitiannya *good governance*, Pengendalian intern dan Budaya Organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin melihat pengaruh *Good Governance*, Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Sektor Publik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian, yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pelalawan serta mengganti variable Budaya Organisasi menjadi Komitmen Organisasi.

Alasan memilih judul Pemerintah Kabupaten Pelalawan sebagai objek penelitian ini karena dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, di Kabupaten Pelalawan mendapatkan kriteria C (cukup). BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu: (1) Pengendalian manajemen kas dan pengelolaan kas non anggaran belum optimal; (2) Pengelolaan persediaan obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih belum memadai; (3) Pengendalian atas pengelolaan dan pencatatan Aset Tetap belum memadai.

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan adalah sebagai berikut diantaranya yaitu: (1)

Penggunaan Langsung Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hasil Klaim dari BPJS dan Jamkesda pada RSUD Selasih dan terdapat kelebihan pembayaran Jasa Pelayanan; (2) Realisasi Belanja Pegawai tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Tahun Anggaran 2015 tidak sesuai ketentuan pemberian tambahan penghasilan; (3) Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah tidak sesuai ketentuan tatacara pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah; (4) Pemberian Tunjangan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Lurah/Kecamatan dalam bentuk honorarium tidak memiliki dasar hukum yang melandasinya; (5) Penyediaan jasa tenaga pendidik dan kependidikan tidak sesuai ketentuan penganggaran dan besaran honorarium belum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah; (6) Pemberian Hibah kepada Pondok Pesantren Modern Manbaul Ma'arifiterus menerus dan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah uang tidak diyakini kewajarannya; dan (7) Belanja Bantuan Sosial perlengkapan sekolah untuk siswa miskin tidak dapat segera dimanfaatkan siswa. Akan tetapi dibandingkan dengan Kota Sukabumi dan Kabupaten Sleman yang mendapatkan kriteria B (baik) pada tahun 2015, tentunya Kabupaten Pelalawan masih ada masalah dan perlu adanya perbaikan.

Selain itu, alasan dipilihnya Kabupaten Pelalawan ini karena berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang telah disampaikan, Kabupaten Pelalawan tahun 2016 mendapatkan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015.

Dari uraian diatas dan berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “**Pengaruh *Good Governance*, Pengendalian Intern Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada OPD Kabupaten Pelalawan)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Good Governance* terhadap kinerja Pemerintah Daerah.
2. Bagaimana pengaruh Pengendalian Intern terhadap kinerja Pemerintah Daerah.
3. Bagaimana pengaruh Komitmen Organisasi terhadap kinerja Pemerintah Daerah.
4. Bagaimana pengaruh *Good governance*, Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menguji secara empiris apakah *good governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten pelalawan.
- b. Untuk menguji secara empiris apakah pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten pelalawan.

- c. Untuk mengetahui secara empiris apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten pelalawan.
- d. Untuk mengetahui secara empiris apakah *good governance*, pengendalian intern, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten pelalawan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat lebih memahami Pengaruh *Good Governance*, Pengendalian Intern Dan Komitmen Organisasi Terhadap Organisasi Pemerintah Daerah (Studi Pada OPD Kabupaten Pelalawan)”. Untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam dari teori yang telah diperoleh dengan kenyataan yang terjadi.
- b. Bagi Pemerintah, Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi Instansi-Instansi yang ada di daerah Pelalawan guna meningkatkan kinerja pemerintahan di masa mendatang. Diharapkan juga dapat memberikan sumbangan penelitian dalam menilai dan mengevaluasi sistem yang sedang berjalan dalam rangka menyempurnakan, mempertahankan, serta mengembangkan praktik-praktik yang dianggap telah memadai.
- c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan tambahan wacana studi empiris dan pertimbangan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan proposal ini dibagi menjadi beberapa bagian dan masing-masing bagian berisikan hal-hal sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Telaah Pustaka dan Hipotesis

Berisi landasan teori yang melandasi penelitian, membahas hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis, dan kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian, serta hipotesis penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Menguraikan deskripsi dari variabel-variabel penelitian, definisi operasional, penentuan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data penelitian, serta metode analisis data dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan

Mengemukakan gambaran umum pemerintah kabupaten pelalawan meliputi sejarah berdirinya pemerintah kabupaten pelalawan, geografis, pemerintahan dan struktur organisasi..

BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, menganalisis, dan mengevaluasi hasil penelitian tersebut.

BAB VI : Penutup

Bab ini akan menutup dengan membuat kesimpulan dan memberikan saran-saran yang dirasakan perlu sesuai dengan hasil dari penelitian yang dilakukan.

